

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018)

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Arief Sdharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PR Refika Aditama, 2008)

Asep Warlan Yusuf, dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2013)

Bagir Manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Hal 1-2

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Mandar Maju, 2008)

Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Rekonstrukturisasi. Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012)

Bohari, *Penghantar Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004),

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2019)

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, (Jakarta : Pradya Paramitha, 1979)
- Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020)
- Fransisca Avianti, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008)
- Hal Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori0Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018)
- I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, ( Bandung: Refika Aditama, 2018)
- I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2006)
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993)
- Jan Gijssels, *et.al, what is rechtceorie?* (Nedherland: Antwepen, 1982)
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Jhon Ilef Malamassam, *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012)
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018)

- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi 2, Cetakan 12. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Made Adi Kusuma dan Ni Ketut Supasti Darmawan, *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Denpasar: Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana)
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta, AND1, 2002)
- Meida Rachmawati *et al.*, *ICLSSEE 2021: Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education*, ICLSSEE, (Jakarta, 2021)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, (Bandung : Mandar Maju, 2003)
- Mukti Fajar Nurdewata, *et.al*, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Ni Wayan Sinaryati, *Fungsi Jaksa Menuntut Terdakwa Korupsi Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2015)

- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korups*, (Yogyakarta : laksbang mediatama, 2008)
- Philip Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice*, (Russel Sage Foundation, 1969-Transaction Publishers, 1980)
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981)
- Priantara Diaz, *Kupas Tuntas Pengawasan ,Pemeriksaan ,dan Penyidikan Pajak*, (Jakarta Barat: Indeks, 2009)
- Peter Machmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Phillipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019)
- Qorry Nisabella, *Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terkait Dengan Prinsip Akusator dan Inquisitor*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011)
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Rahman Syamsuddin, *et.al, Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994)
- Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, (Malang: Setara Press, 2015)

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
- Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Saidi Muhammad Djafar, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sapto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008)
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegak Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1983)
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Perilaku, Hidup yang Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta : Kompas, 2009)
- Serlika Aprita, *et.al, Filsafat Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2010)
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cet. Ke-5, (Bandung: Alumni, 2007)
- Soerodibroto, Sunarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Soemitro Rochmat, *Pajak Penghasilan* (Bandung: Eresco, 1984)
- \_\_\_\_\_, Soemitro Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan* (Bandung: Eresco, 1991)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Sony Devano, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu* (Jakarta: Kencana, 2006)

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)

Suteki, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Budaya Oriental dan Implikasinya Terhadap Cara Berhukum dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2012)

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018)

Y.Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum* (Jakarta: Salemba Empat, 2007)

Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang  
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.  
31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara  
Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap  
Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk  
Pengamanan Swakarsa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5  
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi,  
dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri  
Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu  
Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 /POJK.01/2015 tentang Penyidikan  
Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Surat Penangkapan Nomor Polisi : SP.Kap/37/VI/2004/Eksus, 28 Juni 2004

Surat Penahanan Nomor Polisi : SP.Han.16/VI/2004/Eksus

Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Nomor  
008/SKD/FH-UPH/VIII/2022 tentang Standar Operasional Prosedur  
(SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Fakultas Hukum Universitas Pelita  
Harapan

**Jurnal:**

Farrel Alanda Fitrah, Agus Takariawan, and Zainal Muttaqin, "The Position of Civil Servant Investigator of Directorate General of Tax (DGT) In the Frame of Taxation Criminal Law Enforcement in Indonesia," *SIGN Journal of Law*, Vol. 3, No. 1. Tahun 2021

Jeanne Darn N Manik, *et al.*, "The Authority Investigators Civil Servant in the Criminal Justice", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 58, No.1, Tahun 2017.

Kholilur Rahman, "Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 27, No. 3, Tahun 2020.

Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 44, No. 4, Tahun 2015.

Siti maimana sari ketaren, Alvin Syahrin *et.al*, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, *USU Law Journal*, Vol.II-No.2 (Nov-2013)

Pujiyono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Masalah Hukum (MMH)*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012. DOI : [10.14710/mmh.41.1.2012.118-127](https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.118-127)

W.F. Prins (dalam *Inleiding in het Administratiefrecht van Indonesia*), "Asas dan Norma Hukum administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan" *Jurnal Hukum NOVELTY*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5463>



**Putusan:**

Putusan PN Palembang Nomor 1790/Pid.Sus/2016/PN Plg Tahun 2016

Putusan PN Palembang Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN Plg Tahun 2017

Putusan PN Jambi Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Jmb

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst

**Website:**

Monica Ayu Caesar Isabela, “Lembaga Yudikatif dan Kekuasaan Kehakiman”,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/04000061/lembaga->

[yudikatif-dan-kekuasaan-kehakiman-di-](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/04000061/lembaga-yudikatif-dan-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia#:~:text=Lembaga%20yudikatif%20adalah%20lembaga%20pemerintahan,UUD%20dan%20hukum%20yang%20berlaku)

[indonesia#:~:text=Lembaga%20yudikatif%20adalah%20lembaga%20](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/04000061/lembaga-yudikatif-dan-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia#:~:text=Lembaga%20yudikatif%20adalah%20lembaga%20pemerintahan,UUD%20dan%20hukum%20yang%20berlaku)

[pemerintahan,UUD%20dan%20hukum%20yang%20berlaku](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/04000061/lembaga-yudikatif-dan-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia#:~:text=Lembaga%20yudikatif%20adalah%20lembaga%20pemerintahan,UUD%20dan%20hukum%20yang%20berlaku), diakses

pada 25 Agustus 2022

Nikmah Rodisah, “Manfaat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Upaya

Penegakan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung (Perbandingan

dengan PPNS Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Tingkat I Jawa

Tengah”, [https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id\\_abstrak-](https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-77239.pdf)

[77239.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-77239.pdf), diakses pada 5 Agustus 2022

Shinta Dewi Rusmawati, “Menebarkan Keadilan Sosial dengan Hukum progresif

di Era Komodifikasi Hukum” *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13,

Nomor 1 Juni 2015 ([https://e-](https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/485/490)

[journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/485/490](https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/485/490) )

Tim Hukum Online, “Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-lt61d3e9d0ba550?page=all>, diakses pada 25 Agustus 2022

### **Makalah:**

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)

Mohammad Mahfud MD, Makalah “*Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*”

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Edi Samsudin Nasution selaku Kepala Subdirektorat PPNS pada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Indonesia yang dilakukan pada 02 November 2022.

wawancara dengan Bapak Dony Lusindra selaku PPNS Keimigrasian Direktorat Pengawasan & Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilakukan pada 7 November 2022

wawancara dengan Bapak Musa Nababan selaku Subkoordinator Penindakan pada  
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan  
HAM yang dilakukan pada tanggal 8 November 2022

